



Danantara dan reformasi akuntabilitas asset negara: tinjauan literatur atas praktik sovereign wealth fund di Indonesia

Ari Nugroho Cahyono *, Detti Meilandri, Dian Islamiyati, Nia Rifanda Putri

Fakultas Humaniora dan Saintek, Sarjana Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Kendal Batang
Jl. Pemuda No.42-46, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah

*Korespondensi: ari8cahyono@gmail.com

Article history:

Received: 21/07/2025

Revised: 23/07/2025

Accepted: 01/08/2025

Published: 04/08/2025

Keywords: Danantara, fiscal accountability, financial reform,

Abstract

The establishment of Danantara, Indonesia's sovereign wealth fund (SWF), reflects the government's commitment to enhancing fiscal accountability through more professional and value-oriented public asset management. This article presents a literature review on the role of SWFs within the broader framework of public finance reform, emphasizing the governance of state-owned assets as an integral part of public sector accounting systems. Using a systematic literature review approach, this study explores how Danantara can function as an instrument for identifying, recording, measuring, and disclosing state assets in a more transparent manner, in line with accrual-based standards such as SAP (Government Accounting Standards) and IPSAS (International Public Sector Accounting Standards). The findings suggest that Danantara has the strategic potential to bridge the gap between asset ownership and productive utilization, while simultaneously strengthening the government's capacity to produce more informative and credible financial statements. Within the context of fiscal reform, Danantara is not merely an investment tool, but also a long-term strategy for advancing good governance, fiscal transparency, and sustainable asset management.

Kata Kunci: Akuntansi fiscal, asset negara, danantara, reformasi keuangan

Abstrak

Pembentukan Danantara sebagai lembaga pengelola investasi negara menandai fase baru dalam reformasi manajemen aset publik di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis berbagai literatur akademik dan kebijakan yang membahas praktik sovereign wealth fund (SWF) sebagai instrumen tata kelola aset negara, dengan fokus pada relevansinya terhadap prinsip akuntansi sektor publik. Melalui pendekatan literature review, artikel ini mengkaji konsep, struktur, dan praktik pengelolaan aset negara dari berbagai negara yang telah mengimplementasikan SWF, seperti Norwegia, Singapura, dan Uni Emirat Arab. Temuan menunjukkan bahwa Danantara memiliki potensi strategis dalam meningkatkan efisiensi aset negara, mengurangi beban fiskal, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi keuangan publik apabila dikelola sesuai prinsip good governance dan akuntansi akrual. Namun, keberhasilan implementasinya bergantung pada integrasi antara kerangka regulasi, sistem pelaporan keuangan, dan mekanisme pengawasan yang kuat. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi sektor publik di Indonesia dan memberikan dasar teoretis bagi pengembangan model pelaporan serta audit atas aset yang dikelola Danantara.

©2025 Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak)

This is an open access article distributed under the CC BY-SA 4.0 license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, sovereign wealth fund (SWF) telah menjadi fenomena penting dalam evolusi pengelolaan keuangan negara di berbagai belahan dunia. SWF hadir sebagai instrumen strategis untuk mengelola surplus fiskal, pendapatan sumber daya alam, maupun hasil privatisasi aset negara,

Danantara dan reformasi akuntabilitas asset negara: tinjauan literatur atas praktik sovereign wealth fund di Indonesia

Ari Nugroho Cahyono, Detti Meilandri, Dian Islamiyati, Nia Rifanda Putri

yang tidak hanya disimpan tetapi juga diinvestasikan secara produktif demi keberlanjutan fiskal jangka panjang. Negara-negara dengan kapasitas fiskal yang besar mulai membentuk entitas ini untuk menjawab tantangan ketidakpastian ekonomi global, mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan pajak, dan menata ulang struktur fiskal melalui pendekatan investasi berbasis tata kelola keuangan modern. Perkembangan ini menandai pergeseran paradigma dari sekadar pengelolaan kas negara menuju pengelolaan aset yang terukur, transparan, dan berorientasi hasil (outcome-based asset management) (Puplampu, 2024).

Sejumlah negara telah berhasil menunjukkan peran strategis SWF dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan akuntabilitas fiskal. Norwegia, melalui Government Pension Fund Global (GPF), misalnya, telah mengelola hasil minyak dan gas alamnya dengan prinsip keberlanjutan dan keterbukaan yang tinggi (Swais, 2024). Di Asia, Singapura melalui Temasek Holdings dan GIC, mampu mengoptimalkan aset negara untuk menopang pembangunan nasional tanpa mengganggu stabilitas anggaran tahunan. Bahkan Uni Emirat Arab, dengan Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), telah menunjukkan bagaimana surplus minyak dapat dialihkan menjadi instrumen investasi global yang memperkuat posisi fiskal negara di masa depan. Keberhasilan SWF di negara-negara tersebut tidak terlepas dari integrasi praktik akuntansi sektor publik, sistem pelaporan yang akurat, serta pengawasan berbasis good governance (Belda et al., 2025).

Menanggapi kebutuhan untuk memperbaiki struktur pengelolaan aset dan memperkuat daya tahan fiskal, Indonesia membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang kemudian dikenal dengan nama komersial Danantara. Kehadiran Danantara menjadi titik awal reformasi fundamental dalam sistem pengelolaan aset negara, khususnya dengan orientasi pada pembentukan nilai ekonomi jangka panjang dari aset yang selama ini pasif atau undervalued. Pemerintah tidak hanya bertujuan untuk menarik investasi langsung, tetapi juga mengaktifkan kembali aset negara dalam kerangka investasi produktif. Dalam konteks kebijakan fiskal, Danantara diharapkan berperan sebagai entitas yang mendorong optimalisasi portofolio aset negara, mengurangi ketergantungan terhadap utang, serta memperluas basis pembiayaan pembangunan nasional yang berkelanjutan (Rusyda & Rahardiansah, 2025).

Lebih dari sekadar entitas investasi, Danantara merepresentasikan lompatan besar dalam sistem akuntabilitas aset negara Indonesia. Dalam kerangka akuntansi sektor publik, Danantara membuka ruang bagi pencatatan dan pelaporan aset negara secara lebih sistematis, akrual, dan berbasis nilai wajar (fair value). Mekanisme kerja Danantara menuntut pengelolaan informasi keuangan yang transparan, pencatatan aset non-keuangan yang selama ini tersembunyi, serta pelaporan yang kompatibel dengan prinsip-prinsip International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) maupun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan demikian, Danantara memiliki potensi strategis sebagai instrumen fiskal yang tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah dan memperkuat transparansi publik (Lestari & Emily, 2025).

Meskipun Danantara telah menjadi sorotan dalam berbagai kebijakan ekonomi dan investasi, kajian akademik yang menelaahnya dari perspektif akuntansi sektor publik masih sangat terbatas. Literatur yang mengaitkan fungsi SWF dengan sistem pelaporan keuangan pemerintah dan akuntabilitas aset negara masih terfragmentasi, baik secara konseptual maupun empiris (Feriani, 2024; Rasheed & Shafi, 2023). Oleh karena itu, tinjauan literatur ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan teoritis dan memberikan fondasi akademik yang lebih kuat bagi studi-studi lanjut di bidang akuntansi publik. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memetakan praktik-praktik terbaik (best practices) dalam pengelolaan SWF global, tetapi juga menilai bagaimana Danantara dapat menjadi bagian dari reformasi keuangan publik Indonesia yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan (Rachmad, 2024).

Riset mengenai Danantara menjadi sangat penting mengingat entitas ini merupakan inovasi kelembagaan baru dalam arsitektur keuangan negara yang memiliki implikasi langsung terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset publik di Indonesia. Sebagai bentuk Sovereign Wealth Fund (SWF) nasional yang baru diluncurkan, Danantara belum banyak dikaji secara akademik, terutama dalam konteks akuntansi sektor publik. Oleh karena itu, pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dipilih guna menyusun landasan konseptual dan sintesis tematik dari berbagai sumber ilmiah dan kebijakan global yang relevan, sehingga mampu memberikan pemahaman awal yang komprehensif atas

peran, desain kelembagaan, dan tantangan akuntabilitas yang mungkin dihadapi. Selain menjadi respons atas keterbatasan kajian empiris yang masih minim, metode ini juga memberikan kontribusi penting bagi para peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi sektor publik dalam merumuskan strategi penguatan tata kelola Danantara ke depan (Rusyda & Rahardiansah, 2025).

Danantara sebagai bentuk Sovereign Wealth Fund (SWF) nasional dalam konteks akuntansi sektor publik yang masih belum banyak dikaji secara akademik. Meskipun berbagai negara seperti Norwegia, Singapura, dan Uni Emirat Arab telah membuktikan efektivitas SWF dalam memperkuat ketahanan fiskal dan akuntabilitas pengelolaan aset negara (Sewandono & Arinanto, 2025; Supriyanto, 2021), literatur yang menghubungkan praktik SWF dengan sistem pelaporan keuangan pemerintah, khususnya dalam perspektif Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), masih bersifat fragmentaris dan terbatas. Sementara itu, pembentukan Danantara sebagai SWF Indonesia membawa implikasi penting terhadap reformasi tata kelola aset publik, transparansi fiskal, dan penciptaan nilai ekonomi jangka panjang, namun belum diiringi dengan kajian yang sistematis mengenai bagaimana mekanisme akuntabilitas dan pelaporan keuangan diterapkan dalam konteks sektor publik Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menjadi krusial untuk mengisi gap teoritis dan empiris dalam literatur akuntansi publik serta menyediakan fondasi konseptual bagi penguatan desain kelembagaan dan transparansi Danantara sebagai instrumen keuangan strategis negara.

KAJIAN LITERATUR/PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penelitian ini menggunakan kerangka analisis berbasis tiga dimensi utama untuk memahami peran Danantara sebagai bentuk revolusi akuntabilitas keuangan negara dalam konteks akuntansi sektor publik. Ketiga dimensi tersebut dikembangkan dari perspektif teori akuntabilitas publik, tata kelola investasi negara, dan reformasi fiskal. Berikut penjelasan masing-masing dimensi (Balasundharam & Khadan, 2024):

Dimensi Transformasi Akuntabilitas Fiskal dan Pelaporan Keuangan Negara

Dimensi ini menelaah bagaimana Danantara mendorong perubahan paradigma dalam sistem akuntabilitas fiskal, khususnya melalui penerapan prinsip pelaporan keuangan yang transparan, berbasis risiko, dan dapat diaudit secara independen. Dalam dimensi ini, Danantara dianalisis sebagai entitas yang mentransformasi cara negara melaporkan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan aset strategisnya, dengan menekankan akuntabilitas berbasis kinerja (*performance-based accountability*).

Dimensi Profesionalisme dan Efisiensi dalam Pengelolaan Aset Publik

Dimensi ini mengevaluasi kontribusi Danantara dalam mendorong efisiensi pengelolaan aset negara melalui pendekatan manajerial yang profesional, otonom, dan terpisah dari praktik birokrasi konvensional. Ini termasuk analisis terhadap tata kelola internal Danantara, struktur insentif, pengambilan keputusan investasi, serta penggunaan prinsip-prinsip bisnis dalam mengelola dana public tanpa meninggalkan prinsip akuntabilitas publik.

Dimensi Reformasi Kelembagaan sebagai Motor Revolusi Akuntabilitas Keuangan Negara

Di sinilah letak inti "revolusi": Danantara diposisikan sebagai instrumen inovatif dari reformasi kelembagaan negara yang mampu menjembatani kesenjangan antara keuangan publik dan logika pasar. Dimensi ini melihat bagaimana Danantara mewakili fase baru dalam akuntabilitas keuangan negara yang lebih dinamis, adaptif, dan terintegrasi dengan praktik internasional seperti *sovereign wealth governance*, serta dampaknya terhadap legitimasi fiskal dan keberlanjutan ekonomi nasional.

Dengan kerangka ini, Danantara tidak hanya dipahami sebagai entitas investasi, tetapi sebagai simbol perubahan mendasar (revolusi) dalam bagaimana negara bertanggung jawab atas kekayaan dan keuangannya kepada publik secara lebih profesional, transparan, dan strategis.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengeksplorasi Danantara sebagai instrumen reformasi akuntabilitas pengelolaan aset negara dalam perspektif akuntansi sektor publik. Proses SLR dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi, seleksi, evaluasi kritis, dan sintesis terhadap berbagai literatur yang relevan dan terpercaya. Sumber data berasal dari jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terindeks *SINTA*, *Scopus*, dan *Index Copernicus*, serta dokumen resmi dari pemerintah Indonesia. Kriteria inklusi

Danantara dan reformasi akuntabilitas aset negara: tinjauan literatur atas praktik sovereign wealth fund di Indonesia

Ari Nugroho Cahyono, Detti Meilandri, Dian Islamiyati, Nia Rifanda Putri

mencakup publikasi yang membahas topik tentang *Sovereign Wealth Fund*, tata kelola keuangan negara, akuntabilitas fiskal, dan pengelolaan aset publik, yang diterbitkan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2025. Kata kunci yang digunakan dalam proses pencarian antara lain: "Sovereign Wealth Fund", "public asset accountability", "state-owned investment funds", "Indonesia Investment Authority", dan "Danantara". Data dianalisis secara tematik untuk mengungkap tren konseptual, kesenjangan penelitian (*research gap*), serta kontribusi institusi SWF dalam mendorong profesionalisme dan transparansi pelaporan aset publik (Rusyda & Rahardiansah, 2025).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *analisis konten tematik* yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola makna (*themes*) dalam data literatur yang telah terkumpul. Pendekatan ini digunakan untuk menafsirkan makna konseptual dari berbagai sumber jurnal, dokumen resmi, dan publikasi akademik lainnya yang relevan dengan tema *sovereign wealth fund* (SWF), pengelolaan aset publik, dan akuntabilitas fiskal.

Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui enam tahap utama (Rachmad, 2024):

Familiarisasi dengan Data: Peneliti membaca secara berulang seluruh dokumen yang telah lolos seleksi untuk memahami konteks dan substansi isi masing-masing literatur.

Pengkodean Awal: Dilakukan proses identifikasi dan pengkodean potongan teks yang relevan dengan fokus penelitian, seperti kata kunci terkait praktik SWF, bentuk akuntabilitas, model pengelolaan aset, serta aspek reformasi keuangan publik.

Pencarian Tema: Pengkodean yang telah dikategorikan selanjutnya dikelompokkan ke dalam tema-tema utama, seperti "transparansi fiskal", "*governance* aset negara", "profesionalisme pengelolaan investasi publik", dan "inovasi kebijakan kelembagaan".

Peninjauan Tema: Tema yang telah terbentuk direvisi dan dievaluasi kembali secara menyeluruh untuk memastikan kohesi internal dalam tema dan kejelasan perbedaan antar tema.

Pendefinisian dan Penamaan Tema: Setiap tema didefinisikan secara eksplisit dan diberikan nama representatif yang mencerminkan makna inti dari isu yang diangkat dalam sumber literatur.

Penulisan Laporan: Hasil tematik tersebut kemudian disusun dalam bentuk narasi analitis yang menghubungkan temuan literatur dengan tujuan penelitian, serta menegaskan posisi Danantara dalam konteks reformasi akuntabilitas pengelolaan aset negara.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menguraikan temuan literatur secara deskriptif, tetapi juga melakukan sintesis konseptual yang menekankan kontribusi ilmiah dan implikasi praktis dari keberadaan Danantara dalam kerangka akuntansi sektor publik.

HASIL

Studi mengenai Danantara sebagai entitas sovereign wealth fund (SWF) di Indonesia masih tergolong baru dan umumnya berfokus pada aspek kebijakan investasi, daya saing ekonomi, serta potensi penyerapan modal asing. Beberapa kajian seperti yang dilakukan oleh (Rusyda & Rahardiansah, 2025) membahas Danantara dalam kerangka *investment attractiveness* dan potensi crowding-in terhadap investasi infrastruktur. Di sisi lain, (Lestari & Emily, 2025) menyoroti Danantara dari aspek tata kelola dan risiko politik dalam pengelolaan aset strategis nasional. Namun, kajian-kajian tersebut belum menjangkau dimensi akuntansi sektor publik secara mendalam, khususnya terkait bagaimana Danantara dapat berkontribusi pada reformasi pelaporan aset negara berbasis akrual. Selain itu, belum banyak studi yang memosisikan Danantara sebagai bagian dari sistem akuntabilitas fiskal yang terukur dan terstandar dalam kerangka SAP atau IPSAS. Untuk mengetahui hasil *Literatur Review* secara menyeluruh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Hasil Literatur Review

Penulis	Fokus Penelitian	Metode	Temuan Utama	Keterbatasan / Research Gap
Rusyda & Rahardiansah (2025)	Danantara sebagai sarana <i>investment attractiveness</i> dan <i>crowding-in</i> investasi infrastruktur	Studi Literatur	Menunjukkan potensi Danantara menarik investor asing dan mendorong pembiayaan infrastruktur strategis	Belum membahas akuntabilitas fiskal dan pelaporan aset negara berbasis akrual dalam kerangka SAP/IPSAS
Lestari & Emily (2025)	Risiko politik dan tata kelola Danantara dalam pengelolaan aset strategis nasional	Kualitatif Analisis Kebijakan	Menyoroti potensi intervensi politik dan perlunya governance yang kuat	Tidak membahas dimensi pelaporan keuangan publik atau keterkaitan dengan standar akuntansi sektor publik
Rachmad (2024)	Analisis peran Danantara dalam struktur fiskal negara	Studi Literatur	Mengulas Danantara sebagai entitas fiskal baru dalam struktur kelembagaan investasi nasional	Belum mengaitkan langsung kontribusi Danantara terhadap reformasi akuntabilitas, transparansi aset negara, dan penerapan prinsip-prinsip pelaporan berbasis akrual seperti IPSAS/SAP

Penelitian sebelumnya telah membahas peran Danantara dari berbagai sudut pandang strategis dan kebijakan, namun belum secara komprehensif mengkaji aspek akuntansi sektor publik, khususnya dalam konteks akuntabilitas fiskal dan pelaporan aset negara berbasis akrual. Rusyda & Rahardiansah (2025) menyoroti Danantara sebagai sarana untuk meningkatkan daya tarik investasi dan mendorong pembiayaan infrastruktur melalui mekanisme *crowding-in*, tetapi belum menyentuh isu pelaporan aset negara dalam kerangka Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) maupun International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Lestari & Emily (2025) menekankan risiko intervensi politik serta pentingnya tata kelola dalam pengelolaan aset strategis nasional oleh Danantara, namun tidak mengelaborasi hubungan antara tata kelola tersebut dengan sistem pelaporan keuangan publik. Sementara itu, Rachmad (2024) mengulas posisi Danantara dalam struktur fiskal negara dan kontribusinya sebagai entitas fiskal baru, namun belum membahas bagaimana keberadaan Danantara dapat mendorong reformasi akuntabilitas dan transparansi dalam pencatatan serta pelaporan aset negara berbasis nilai wajar. Fokus pada dimensi pelaporan akuntansi sektor publik dan akuntabilitas fiskal Danantara sebagai bagian dari reformasi kelembagaan keuangan negara.

PEMBAHASAN

Dimensi 1: Transformasi Akuntabilitas Fiskal dan Pelaporan Keuangan Negara.

Hasil kajian literatur sistematis menunjukkan bahwa praktik *sovereign wealth fund* (SWF) di berbagai negara telah mendorong lahirnya standar baru dalam pelaporan dan akuntabilitas fiskal. Studi oleh (Lestari & Emily, 2025) menyebutkan bahwa negara-negara seperti Norwegia, Singapura, dan Uni Emirat Arab membangun kerangka pelaporan yang tidak hanya menekankan transparansi angka, tetapi juga transparansi strategi, risiko, dan hasil investasi jangka panjang. Prinsip ini diterapkan melalui

Danantara dan reformasi akuntabilitas aset negara: tinjauan literatur atas praktik sovereign wealth fund di Indonesia

Ari Nugroho Cahyono, Detti Meilandri, Dian Islamiyati, Nia Rifanda Putri

laporan tahunan yang diaudit secara independen, publikasi berkala berbasis indikator kinerja utama (*key performance indicators*), serta keterlibatan parlemen dalam proses review.

Dalam konteks Indonesia, kehadiran Danantara menandai dimulainya pergeseran dari pendekatan birokratis terhadap aset negara menuju pendekatan korporatis berbasis kinerja. Literatur pemerintah, termasuk Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2023 dan dokumen resmi INA (Indonesia Investment Authority), menunjukkan bahwa Danantara dirancang untuk mengelola aset negara dengan sistem pelaporan setara entitas bisnis, bukan sekadar unit pelaksana anggaran. Ini termasuk kewajiban menyusun laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, pelaporan tahunan kepada Presiden dan DPR, serta pengawasan oleh Komite Audit dan Dewan Pengawas Independen (Rusyda & Rahardiansah, 2025).

Lebih jauh, penelitian oleh (Rachmad, 2024) juga memperkuat bahwa SWF modern harus mengadopsi prinsip *fiscal transparency* sebagai elemen legitimasi institusionalnya. Dengan mendesain Danantara sebagai entitas hibrida—memiliki fleksibilitas investasi namun berada di bawah kerangka tanggung jawab publik—pemerintah Indonesia sesungguhnya tengah mendorong revolusi dalam akuntabilitas fiskal. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada bagaimana aset negara dikelola dan dilaporkan, tetapi juga menggeser orientasi pelaporan dari sekadar pemenuhan administrasi menuju pelaporan sebagai alat legitimasi fiskal dan komunikasi publik.

Sintesis literatur juga menunjukkan bahwa dibandingkan dengan praktik pelaporan aset tetap pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Danantara memberikan model alternatif pelaporan berbasis nilai ekonomi aset (*value-based reporting*), yang membuka ruang bagi peran akuntansi sektor publik untuk lebih strategis dan prospektif. Dengan demikian, Danantara berpotensi menjadi pionir dalam integrasi antara pelaporan keuangan sektor publik dengan nilai tambah ekonomi, bukan hanya nilai historis atau administratif (Rusyda & Rahardiansah, 2025).

Dimensi 2: Profesionalisme dan Efisiensi dalam Pengelolaan Aset Publik.

Profesionalisme dan efisiensi menjadi dua indikator kunci dalam keberhasilan *sovereign wealth fund* (SWF), sebagaimana ditegaskan dalam berbagai studi seperti (Puplampu, 2024). Negara-negara dengan SWF yang mapan, seperti Norwegia (Government Pension Fund Global) dan Singapura (Temasek Holdings), menunjukkan bahwa pengelolaan kekayaan negara secara profesional hanya dapat tercapai ketika struktur kelembagaan SWF terpisah dari intervensi politik, menerapkan prinsip manajemen risiko yang kuat, dan dikelola oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi global. Praktik-praktik ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan aset, tetapi juga memperkuat kredibilitas fiskal negara di mata investor dan lembaga internasional (Belda et al., 2025).

Kehadiran Danantara di Indonesia mencerminkan upaya untuk mereplikasi model-model tersebut dengan adaptasi lokal. Berdasarkan dokumen publik dari Kementerian Keuangan dan INA (Indonesia Investment Authority), Danantara didesain sebagai entitas independen yang menerapkan prinsip *professional asset management* dengan tata kelola korporasi modern. Struktur organisasi Danantara memuat Dewan Pengawas Independen, Komite Audit, dan Direksi yang dipilih berdasarkan merit dan pengalaman internasional. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka, dan strategi investasi Danantara dirancang berdasarkan *return-risk profiling*, yang sebelumnya belum diterapkan dalam pengelolaan aset negara oleh kementerian teknis (England et al., 2023).

Efisiensi juga tercermin dari model pengelolaan portofolio aset yang tidak lagi bersifat pasif. Literatur seperti (Nahidi, 2025) mencatat bahwa salah satu kendala terbesar dalam pengelolaan aset publik di negara berkembang adalah dominasi pendekatan administrasi-statis, bukan berbasis produktivitas. Danantara mencoba melampaui hal ini dengan memposisikan aset negara sebagai instrumen investasi strategis. Hal ini antara lain diwujudkan dalam skema pengelolaan aset-aset BUMN yang selama ini *underutilized* menjadi produktif melalui konsolidasi, restrukturisasi, atau pengalihan ke sektor swasta dengan model *co-investment*.

Namun demikian, efektivitas profesionalisme ini masih dalam tahap awal dan belum sepenuhnya teruji. Beberapa kajian kebijakan seperti yang dirilis oleh (Sibero, 2024) menyarankan perlunya penguatan kerangka akuntabilitas internal, terutama dalam integrasi sistem informasi keuangan, sistem pengukuran kinerja berbasis outcome, serta transparansi atas *fee structure* dan biaya pengelolaan. Ini

menjadi tantangan sekaligus ruang refleksi bagi akuntansi sektor publik untuk merumuskan standar pengelolaan aset negara berbasis efisiensi ekonomi namun tetap akuntabel secara publik. Dengan demikian, dimensi ini menunjukkan bahwa Danantara bukan hanya instrumen pengelolaan kekayaan negara, tetapi juga ruang eksperimental bagi modernisasi akuntansi sektor publik, khususnya dalam hal efisiensi fiskal, profesionalisme kelembagaan, dan optimalisasi aset negara dalam *kerangka good governance*.

Dimensi 3: Reformasi Kelembagaan sebagai Motor Revolusi Akuntabilitas Keuangan Negara.

Literatur tentang akuntansi sektor publik menegaskan bahwa akuntabilitas fiskal tidak dapat ditingkatkan secara signifikan tanpa reformasi kelembagaan yang mendasar. Reformasi ini mencakup penataan ulang struktur organisasi, pelimpahan fungsi secara profesional, desentralisasi keputusan berbasis kinerja, dan integrasi sistem informasi keuangan yang mampu menyediakan data relevan secara real-time. Dalam konteks sovereign wealth fund (SWF), pembentukan entitas kelembagaan yang terpisah dari birokrasi konvensional dipandang sebagai langkah strategis untuk menciptakan ekosistem pengelolaan keuangan negara yang lebih adaptif, transparan, dan responsif terhadap dinamika ekonomi global (Nezamolmolki & Ebrahimi, 2025).

Keberadaan Danantara sebagai bagian dari lanskap baru pengelolaan kekayaan negara di Indonesia mengindikasikan perubahan paradigma kelembagaan. Dalam berbagai telaah literatur, disoroti bahwa lembaga seperti Danantara menandai pelembagaan logika bisnis ke dalam sektor publik, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip akuntabilitas publik. Entitas ini didesain untuk beroperasi di luar mekanisme anggaran negara yang rigid, namun tetap dalam kerangka regulasi dan pengawasan institusional yang ketat. Ini memberikan ruang bagi fleksibilitas operasional sekaligus menuntut tingkat pertanggungjawaban yang lebih tinggi (Rasheed & Shafi, 2023).

Reformasi kelembagaan ini juga berdampak terhadap bagaimana akuntabilitas diformulasikan dan dipraktikkan. Jika sebelumnya akuntabilitas keuangan negara banyak diukur melalui kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi administratif, maka dengan adanya Danantara, akuntabilitas difokuskan pada pencapaian hasil (outcomes), pengelolaan risiko strategis, serta penciptaan nilai ekonomi dari aset negara. Hal ini selaras dengan pandangan New Public Management dan literatur tentang post-bureaucratic governance, yang menempatkan akuntabilitas sebagai instrumen kinerja, bukan sekadar administrasi (Al-Yasiri et al., 2023).

Selain itu, reformasi kelembagaan juga membawa perubahan pada sistem pelaporan dan audit. Danantara, sebagai entitas korporatis, diharuskan menyusun laporan keuangan berbasis standar internasional, diaudit oleh auditor independen, dan dilaporkan kepada publik dalam mekanisme yang terbuka. Hal ini memunculkan praktik pelaporan ganda: satu sisi memenuhi tuntutan transparansi publik, sisi lain mengadopsi efisiensi dan disiplin pelaporan korporasi. Dalam konteks akuntansi sektor publik, ini menjadi lahan baru untuk mengembangkan metodologi pelaporan yang hybrid, yaitu memadukan akuntabilitas sosial dengan kinerja ekonomi (Diaz & Gajes, 2025).

Oleh karena itu, reformasi kelembagaan yang direpresentasikan oleh Danantara bukan sekadar perubahan struktur teknis, melainkan bagian dari revolusi akuntabilitas keuangan negara. Transformasi ini memberi sinyal bahwa pemerintah tidak hanya berkomitmen pada efisiensi dan profesionalisme, tetapi juga membuka diri terhadap praktik-praktik global yang menuntut transparansi berbasis nilai dan hasil. Dengan demikian, Danantara dapat dilihat sebagai model baru pengelolaan keuangan negara yang tidak hanya responsif terhadap tantangan fiskal, tetapi juga proaktif dalam membangun legitimasi publik melalui akuntabilitas yang berbasis kinerja (Feriani, 2024).

SIMPULAN

Hasil literatur review pada penelitian ini adalah Danantara memiliki potensi strategis sebagai entitas sovereign wealth fund (SWF) dalam mendukung reformasi akuntabilitas pengelolaan aset negara di Indonesia. Tinjauan atas berbagai literatur menunjukkan bahwa keberhasilan Danantara akan sangat ditentukan oleh tiga dimensi utama: transparansi dan akuntabilitas fiskal, tata kelola dan profesionalisme pengelolaan aset, serta reformasi kelembagaan dalam sistem keuangan publik. Meskipun secara konseptual Danantara dirancang untuk menjadi instrumen fiskal modern yang mampu menarik investasi dan meningkatkan efisiensi, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam integrasi pelaporan, kontrol internal, dan pemisahan fungsi politik. Oleh karena itu, diperlukan

Danantara dan reformasi akuntabilitas asset negara: tinjauan literatur atas praktik sovereign wealth fund di Indonesia

Ari Nugroho Cahyono, Detti Meilandri, Dian Islamiyati, Nia Rifanda Putri

penguatan kerangka regulasi, audit publik, serta adopsi prinsip akuntansi sektor publik seperti SAP atau IPSAS guna memastikan legitimasi, keberlanjutan, dan akuntabilitas Danantara dalam jangka panjang.

Penelitian ini memperluas kajian teoritis tentang sovereign wealth fund (SWF) dalam akuntansi sektor publik melalui studi atas Danantara sebagai entitas fiskal baru di Indonesia. Secara empiris, penelitian ini menyoroti pentingnya integrasi transparansi fiskal, tata kelola profesional, dan reformasi kelembagaan dalam pengelolaan aset negara. Temuan menunjukkan bahwa Danantara berpotensi menjadi katalis reformasi manajemen keuangan publik dan alat optimalisasi aset strategis. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pelaporan berbasis SAP/IPSAS guna meningkatkan akuntabilitas fiskal. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan eksplorasi empiris terhadap tata kelola, sistem pelaporan, dan mekanisme pengawasan Danantara.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Yasiri, N., Jabouri, A., Nehme, A. A., & ... (2023). Sovereign Wealth Funds and the Possibility of Achieving Sustainable Development (Requirements for Establishing a Sovereign Fund for Iraq). *Alkut University ...* https://js.alkutcollege.edu.iq/article_23939.html?lang=en
- Balasundharam, V., & Khadan, J. (2024). Factors supporting sovereign wealth fund adoption. *Applied Economics Letters*. <https://doi.org/10.1080/13504851.2024.2332588>
- Belda, P., Rojas, L. E., & Zoi, S. (2025). CAN A SOVEREIGN WEALTH FUND IMPROVE FISCAL SUSTAINABILITY? Available at SSRN 5170205. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5170205
- Diaz, J., & Gajes, A. L. P. (2025). ... and Transparency in Sovereign Wealth Funds: A Systematic Review of Global Practices and Policy Insights for the Maharlika Investment Fund in the Philippines. Available at SSRN 5211840. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5211840
- England, A., Kerr, S., & Al-Atrush, S. (2023). The new Gulf sovereign wealth fund boom. *Financial Times*.
- Feriani, S. (2024). Structuring an effective sovereign wealth fund. *The Palgrave Handbook of Sovereign Wealth Funds*. https://doi.org/10.1007/978-3-031-50821-9_15
- Lestari, R., & Emily, L. C. (2025). Market Reactions to Sovereign Wealth Fund Formation in An Emerging Market: Price Inertia and Microstructure Volatility in Indonesia's Danantara. *American Journal of Economic and Management*. <http://ajemb.us/index.php/gp/article/view/215>
- Nahidi, N. (2025). A Blockchain-Enabled US Sovereign Wealth Fund: Funding Constraints, Regulatory Barriers, and Portfolio Implications. *Regulatory Barriers, and Portfolio Implications (March ...* https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5289875
- Nezamolmolki, J., & Ebrahimi, S. N. (2025). The Legal Nature of Sovereign Wealth Funds and Their Impacts on International Claims with a look at the National Development Fund. *Public Law Research*. https://qjpl.atu.ac.ir/article_19049_en.html
- Puplambu, K. P. (2024). "We have a Sovereign Wealth Fund; we are now Global Actors": The Importance of Sovereign Investments and Natural Resource Management in Africa. *Handbook of Natural Resource Governance in* <https://doi.org/10.4324/9781003017479-15>
- Rachmad, Y. E. (2024). Regulatory Frameworks and Institutional Challenges in Sovereign Wealth Fund Management: Shuji Tebie Ban. *The Danantara Perspective. The United Nations Global*
- Rasheed, S., & Shafi, S. M. (2023). Sovereign Wealth Funds and Corporate Investments: Evidence from Norway Sovereign Wealth Fund target firms. *RESEARCH REVIEW International Journal of* <http://www.rjournal.com/index.php/rrijm/article/view/899>
- Rusyda, M. F. A., & Rahardiansah, T. (2025). Peran dan Kedudukan Danantara Dalam Mengelola Investasi Sebagai Badan Sovereign Wealth Fund (SWF). *Jurnal Riset* <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie/article/view/587>
- Sewandono, R. E., & Arinanto, S. (2025). Pendekatan dan Pengaturan Hukum Daya Anagata Nusantara Terhadap Prinsip dan Praktik Terbaik Sovereign Wealth Fund. *Jurnal Knowledge on Sustainable Economy, Public Policy & Social Innovation*, 1(1), 1–25.
- Sibero, R. L. T. (2024). Pembentukan Sovereign Wealth Fund Melalui Lembaga Manajemen Investasi dalam rangka Optimalisasi Investasi Asing. *Jurnal Darma Agung*.

- Supriyanto, E. E. (2021). Strategi Penerapan Kebijakan Sovereign Wealth Funds (SWFs) di Indonesia: Studi Literatur dan Studi Komparatif Oman. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 3(1), 10. <https://doi.org/10.33474/jisop.v3i1.6959>
- Swaiss, A. (2024). Beyond Borders, Beyond Certainty: A Critical Analysis of Legal Frameworks for Sovereign Wealth Fund Investments. *of Legal Frameworks for Sovereign Wealth Fund ...* https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4761291